

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa lain baik di kawasan Asia Tenggara, Asia, Asia-Fasifik, dan seluruh dunia. Kualifikasi pendidikan di Indonesia akan menggambarkan kualifikasi dari sumber daya manusia yang ada. Rendahnya mutu pendidikan nasional seperti yang ditunjukkan oleh hasil studi berskala antar bangsa melahirkan kesadaran bahwa usaha peningkatan kualitas pendidikan telah tertinggal dari beberapa negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Malayasia, Thailand dan yang lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah kualifikasi dan kompetensi SDM yang kurang memadai, sarana prasarana yang kurang, budaya atau iklim kerja yang kurang efektif, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kinerja komite sekolah yang belum maksimal, kinerja kepala sekolah, dan faktor-faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi mutu pendidikan.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru, pengawas maupun kepala sekolah, dituntut keprofesionalannya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tuntutan kompetensi guru, pengawas maupun kepala sekolah. Menurut PP No 19 tahun 2005, karena pengawas, kepala sekolah dan guru adalah tiga unsur yang berperan aktif dalam persekolahan. Guru sebagai pelaku pembelajaran yang secara langsung berhadapan dengan para siswa di ruang kelas,

dan pengawas serta kepala sekolah adalah pelaku pendidikan di dalam pelaksanaan tugas kepengawasan dan manajerial pendidikan yang meliputi tiga aspek yaitu supervisi, pengendalian dan inspeksi kependidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang Pengawas. Guru sebagai penjamin mutu pendidikan di ruang kelas, sementara pengawas dan kepala sekolah adalah penjamin mutu pendidikan dalam wilayah yang lebih luas lagi. Pada era otonomi sekarang ini, sekolah harus berubah kearah yang sesuai dengan tuntutan masa, agar tidak ketinggalan zaman. Suhardan (2016:8) menyatakan bahwa, Perubahan yang seharusnya terjadi di sekolah pada era otonomi pendidikan terletak pada : 1) Peningkatan kinerja staf, 2) Pengelolaan sekolah menjadi berbasis lokal, 3) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan lembaga, 4) Akuntabilitas, 5) Transparansi, 6) Partisipasi masyarakat, 7) Profesionalisme pelayanan belajar, dan 8) Standarisasi.

Kedelapan aspek tersebut seharusnya membawa sekolah kepada keunggulan mutu lembaga, sebab sekolah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan peningkatan mutu layanan belajar, namun kenyataannya belum terjadi. Lebih lanjut Suhardan (2016:9) mengemukakan sekolah-sekolah kini belum mampu memberi layanan belajar bermutu karena belum mampu memberi kepuasan belajar peserta didiknya. Usaha apapun yang telah dilakukan pemerintah mengawasi jalannya pendidikan untuk mendobrak mutu bila tidak ditindak lanjuti dengan pembinaan gurunya, maka tidak akan berdampak nyata pada kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan pembinaan guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan, dan pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Sementara salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (sekolah), khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan salah satunya adalah diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan bagi sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang sebagai mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah orang tua dan masyarakat dapat ikut merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggara dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak

kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidikan.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi dan studi dokumentasi yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2025 diperoleh data ketercapaian kinerja komite sekolah disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Ketercapaian Kinerja Komite Sekolah
SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2025

No.	Aspek	Target (%)	Ketercapaian (%)
1	Pemberi Pertimbangan	100	75
2	Pendukung	100	85
3	Pengontrol	100	76
4	Mediator	100	80
Rata-Rata			79

Sumber: SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat ketercapaian kinerja komite sekolah di SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap tahun 2025 secara umum mencapai 79%. Pada aspek pemberi pertimbangan baru mencapai 75% dan pada aspek pengontrol baru mencapai 76% dibandingkan dengan aspek lain sudah melebihi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komite sekolah belum mencapai target yang diharapkan sehingga perlu peningkatan.

Selain komite sekolah, mutu layanan pendidikan memiliki kaitan erat dengan kemampuan manajerial kepala sekolah. Seorang kepala sekolah dituntut untuk selalu bertanggung jawab agar para guru, staf, dan siswa menyadari akan

tujuan sekolah yang telah ditetapkan, dengan kesadaran tersebut para guru, staf dan siswa dengan penuh semangat, keyakinan melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas-tugas dengan penuh kesadaran, maka setiap kepala sekolah harus bertanggung jawab untuk menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, berbagai peraturan dan suasana yang mendukung kegiatan pembelajaran.

Menurut Atmodiwiryo (2002) dalam Herman (2025:39) menyebutkan bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah meliputi kemampuan konseptual (*conceptual skill*), kemampuan hubungan kemanusiaan (*Human Skill*), dan kemampuan teknik (*Technical Skill*). Kemampuan konseptual merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Keterampilan manusiawi merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Selanjutnya keterampilan teknik merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang yang khusus.

Selanjutnya untuk mengetahui kompetensi manajerial kepala sekolah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Ketercapaian Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah
SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2025

No.	Aspek/Dimensi	Target (%)	Ketercapaian (%)
1	Kemampuan Konseptual (<i>conceptual skill</i>)	100	75
2	Kemampuan Hubungan Kemanusiaan (<i>Human Skill</i>)	100	85
3	kemampuan teknik (<i>Technical Skill</i>)	100	79
	Rata-Rata	100	79,7

Sumber: SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ketercapaian kompetensi manajerial kepala sekolah di SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap tahun 2025 secara umum baru mencapai 79,7%. Kemampuan yang paling rendah berada pada dimensi kemampuan konseptual (*conceptual skill*) baru mencapai 75%, sedangkan kemampuan hubungan kemanusiaan telah mencapai 85%. Namun demikian kompetensi manajerial kepala sekolah perlu ditingkatkan.

Wayan Koster dalam Permadi (2021:97) mengemukakan bahwa dalam konteks MPMBS, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan: (1) menjabarkan sumber daya sekolah untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, (2) kepala administrasi, (3) sebagai manajer perencanaan dan pemimpin pengajaran, dan (4) mempunyai tugas untuk mengatur, mengorganisir dan memimpin keseluruhan pelaksanaan tugas tugas pendidikan di sekolah. Dikemukakan pula bahwa sebagai kepala administrasi, kepala sekolah bertugas untuk membangun manajemen sekolah serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan keputusan manajemen dan kebijakan sekolah.

Sedangkan Hadari (2020:125) bahwa dalam perspektif peningkatan mutu pendidikan terdapat empat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan, yaitu: (1) kemampuan mengorganisasikan dan membantu staf di dalam merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah dalam bentuk program yang lengkap; (2) kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri sendiri dari guru-guru dan anggota staf sekolah lainnya; (3) kemampuan untuk membina dan memupuk kerja sama dalam mengajukan dan melaksanakan program-program supervisi; dan (4) kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru-guru serta segenap staf sekolah lainnya agar mereka dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab berpartisipasi secara aktif pada setiap usaha-usaha sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah dan mutu layanan pendidikan.

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat (Rini, 2021:81). Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (dapat dipegang) maupun yang *intangible* (tidak dapat dipegang) (Suryosubroto, 2020:210).

Pandangan secara umum banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan lingkup belajar lainnya melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat,

biaya pendidikan yang cukup, manajemen pendidikan yang dilakukan secara professional, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang professional. Standar nasional pendidikan yang tepat untuk seluruh kalangan penyelenggara pendidikan perlu ditetapkan sebagai acuan norma dalam pendidikan.

Selanjutnya untuk mengetahui mutu layanan pendidikan di SMP Komda Jeruklegi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
Ketercapaian Mutu Layanan Pendidikan di SMP Komda Jeruklegi
Kabupaten Cilacap Tahun 2025

No.	Uraian	Target (%)	Realisasi
1	Berwujud (<i>tangible</i>)	100	85
2	Keandalan (<i>reliability</i>)	100	75
3	Daya Tanggap (<i>responsiveness</i>)	100	79
4	Kepastian (<i>assurance</i>)	100	80
5	Empati (<i>empathy</i>)	100	80
	Rata-Rata	100	79,8

Sumber: SMP Negeri 1 Jeruklegi, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ketercapaian mutu layanan pendidikan di SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2025 secara umum baru mencapai 79,8%. Beberapa indikator mutu layanan pendidikan yang paling rendah yaitu pada indikator keandalan dan daya tanggap yang memerlukan perhatian khusus bagi pemangku kebijakan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Agus (2016) yang memberikan kesimpulan bahwa prioritas utama dalam peningkatan mutu pelayanan sekolah adalah pada Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah itu sendiri karena variabel ini terbukti memiliki pengaruh positif, namun tidak terlalu kuat atau masih kurang terhadap mutu pelayanan pendidikan. Sedangkan kinerja guru berpengaruh

positif dan kuat terhadap mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Sedangkan kaitan dengan kinerja komite sekolah belum dilakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kinerja komite sekolah, kompetensi manajerial kepala sekolah, dan mutu layanan pendidikan, sehingga judul penelitian adalah **“Pengaruh Kinerja Komite Sekolah Dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan (Studi di SMP Komda Jeruklegi Kabupaten Cilacap).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kinerja komite sekolah belum optimal sehingga belum memberikan dampak positif pada mutu layanan pendidikan.
2. Kompetensi manajerial kepala sekolah perlu peningkatan.
3. Mutu layanan pendidikan belum memberikan kepuasan kepada pihak pengguna.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kinerja komite sekolah terhadap mutu layanan pendidikan?
2. Adakah pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap mutu layanan pendidikan?

3. Adakah pengaruh kinerja komite sekolah dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap mutu layanan pendidikan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui:

1. Pengaruh kinerja komite sekolah terhadap mutu layanan pendidikan.
2. Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap mutu layanan pendidikan.
3. Pengaruh kinerja komite sekolah dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap mutu layanan pendidikan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang pengaruh kinerja komite sekolah, kompetensi manajerial kepala sekolah, dan mutu layanan pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti lanjutan guna menambah wawasan keilmuannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan terhadap kinerja komite sekolah, kompetensi manajerial kepala sekolah, dan mutu layanan pendidikan.